

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini kegiatan proyek konstruksi di Indonesia berkembang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya proyek pembangunan gedung serta proyek infrastruktur pada setiap daerah. Kegiatan proyek konstruksi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang dan terbatas serta sumber daya tertentu. Banyak *stakeholder* yang terlibat dalam proses kegiatan konstruksi sehingga sering menyebabkan terjadinya permasalahan yang harus diselesaikan dalam kegiatan proyek konstruksi tersebut.

Limbah konstruksi merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Pada pelaksanaan proyek konstruksi, sisa material atau *construction waste* tidak dapat dihindari. Sisa material konstruksi didefinisikan sebagai sesuatu yang sifatnya berlebih dari yang disyaratkan baik itu berupa hasil pekerjaan maupun material konstruksi yang tersisa/tercecer dan rusak, sehingga tidak dapat digunakan lagi sesuai fungsinya (J. R. Illingworth, 1998). Banyak faktor yang menjadi sumber terjadinya sisa material konstruksi, antara lain desain, pengadaan material, pengelolaan material, pelaksanaan, residul dan lain-lain misalnya pencurian (Gavilan dan Bemold, 1994).

Pada daerah Jawa khususnya Yogyakarta merupakan daerah yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan karena selain tempat wisatanya yang indah, budaya

Yogyakarta juga merupakan salah satu daya tarik bagi masyarakat kota lain. Terlepas dari tempat wisata dan budayanya yang unik, kebutuhan akan pembangunan struktur dan infrastruktur yang baik juga menjadi salah satu alasan meningkatnya jumlah penduduk dan pendatang di daerah Yogyakarta. Dalam Pelaksanaan proyek-proyek konstruksi di daerah Yogyakarta tentunya tidak terlepas juga dari permasalahan mengenai *construction waste* yang dihasilkan dari kegiatan proyek tersebut. Cara mengatasi limbah konstruksi setiap proyek juga ada yang berbeda-beda, ada yang menjualnya dan ada juga yang menggunakan kembali sisa-sisa dari material tersebut.

Perbedaan Kota tempat tinggal, kehidupan sosial serta budaya yang sudah ada pada masing-masing daerah, menjadi ciri khas tersendiri dari daerah tersebut. Sama halnya dengan daerah Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) juga memiliki banyak suku dan budaya yang beragam, serta tempat wisata yang indah. Provinsi NTT terdiri dari beberapa pulau antara lain ada 11 Pulau, dan Kota Kupang merupakan ibukota dari provinsi NTT yang letaknya di bagian barat Pulau Timor. Kegiatan proyek konstruksi yang ada di Provinsi NTT khususnya di Kota Kupang juga mengalami permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan proyek konstruksi yang berada di kota lain, salah satunya mengenai limbah konstruksi atau *construction waste*.

Kusumah (2007) mengatakan suku-suku bangsa yang hidup dalam suatu kawasan dapat memposisikan diri masing-masing dengan baik, intinya nilai-nilai budaya yang mereka dukung dijadikan pedoman atau acuan untuk bergaul dengan lingkungan masyarakat yang beragam. Nilai tersebut dimiliki oleh semua suku

bangsa yaitu nilai budaya yang merujuk kepada pentingnya membangun kerukunan dengan bangsa lain. Masyarakat Yogyakarta terdiri dari berbagai sukubangsa, memiliki simbol-simbol budaya yang dipahami dan dijadikan pedoman untuk berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan budaya. Selain simbol budaya yang bersifat kesukuan dan tetap dipertahankan sebagai identitas sukubangsanya, mereka pun mengakui adanya simbol budaya yang menyatukan warga secara keseluruhan. Simbol-simbol tersebut antara lain, Bendera Putih yang menjadi simbol adanya musibah kematian warga. Berbeda halnya dengan masyarakat Yogyakarta, nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Kupang secara umum tercampur dengan nilai Agama Kristiani yang mayoritas dianut oleh warga Kupang. Apabila bicara soal agama, maka mau tidak mau akan terikat juga dengan adat istiadat yang menjadi pandangan orang Timor. *Agape* adalah suatu kata yang menjadi rujukan masyarakat Kupang karena mempunyai makna cinta, saling menghormati, kesediaan untuk memberi dan berkorban.

Dari perbedaan budaya serta kehidupan sosial dari kedua daerah ini, yaitu daerah Yogyakarta dan daerah Kupang, pastinya ada perbedaan juga dari sisi pelaksanaan proyek konstruksi dan cara pengelolaan limbah konstruksi pada proyek-proyek yang dikerjakan, dilihat dari pendidikan, dan pengalaman dari *stakeholder* itu sendiri, serta pandangan mereka mengenai limbah konstruksi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun permasalahan yang akan difokuskan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa saja penyebab terjadinya *construction waste*?
2. Bagaimana penanganan sisa material yang akhirnya akan menjadi *construction waste*?
3. Apakah terdapat perbedaan cara pengelolaan *construction waste* antara Kontraktor di Yogyakarta dan Kontraktor di Kupang?

1.3. Batasan Masalah

Guna memperjelas berbagai permasalahan dan memudahkan dalam menganalisis, maka adapun batasan masalah dalam tesis ini yaitu

- a. Penelitian akan dilakukan di daerah Yogyakarta dan Kupang dengan respondennya adalah kontraktor yang telah/sedang terlibat dalam pelaksanaan proyek konstruksi di daerah tersebut.
- b. Data diperoleh dengan serangkaian pertanyaan berupa kuesioner yang ditujukan kepada calon responden sebanyak 70 buah kuesioner, yang terbagi menjadi 2 yaitu masing 35 kuesioner di daerah Yogyakarta dan Kupang.
- c. Objek penelitian ditujukan kepada kontraktor kelas menengah untuk daerah Yogyakarta dan Kupang.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam dari penulisan studi ini antara lain:

1. Mengidentifikasi penyebab terjadinya *construction waste*.
2. Mengkaji penanganan sisa material yang akhirnya akan menjadi *construction waste*.
3. Mengkaji apakah terdapat perbedaan cara pengelolaan *construction waste* antara Kontraktor di Yogyakarta dan Kontraktor di Kupang.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dalam penanganan dan pengelolaan *construction waste* yang dihasilkan dalam kegiatan proyek konstruksi, agar bisa meminimalisir pengeluaran biaya secara berlebihan dengan melihat cara pengelolaan yang dilakukan oleh dua wilayah yang berbeda.